

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN AS-FILIPINA

2.1 Sejarah Kerjasama Filipina-AS Kaitan Terhadap VFA

2.1.1 Hubungan Bilateral Filipina-AS sebelum era Duterte

Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang selama hampir lebih dari tiga ratus tahun berada di bawah dominasi asing, mulai dari pendudukan Spanyol hingga AS. Pendudukan AS sendiri dimulai dari tahun 1898 dimana Filipina beralih dari koloni dibawah pendudukan Spanyol ke AS.¹

Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, dari sini Filipina mulai menjalankan negara berdaulatnya sendiri. Sebagai negara yang baru merdeka, Filipina kesulitan menjalankan pemerintahannya secara internal maupun eksternal. Pasca perang dunia dua pada Agustus 1944 Republik Filipina dihadapkan pada tantangan dan peluang dalam berdiplomasi dengan AS.²

Pada tahun 1960-an terdapat peningkatan pasukan militer AS yang memerangi komunisme saat di Vietnam, sehingga membuat pemerintah AS kemudian memanfaatkan Filipina untuk membangun basis militernya. Bahkan *Subic Naval Base* dan *Clark Air Base* yang berada di Filipina bahkan dikenal sebagai basis militer AS terbesar di dunia selama perang.³

Pangkalan militer AS di Filipina berubah menjadi sebuah landasan utama untuk memfasilitasi perang di Vietnam, sementara komunitas warga Filipina di sekitar basis militer diubah menjadi kawasan beristirahat dan rekreasi bagi tentara AS. Hal tersebut menciptakan sebuah peluang ekonomi bagi masyarakat Filipina. Pemerintah Republik Filipina melihat kebutuhan Amerika Serikat yang besar di wilayahnya, khususnya penggunaan lahan untuk kepentingan perang, pemerintahan Presiden Marcos (1965-1986) kemudian mulai menarik biaya sewa untuk penggunaan lahan sebagai basis militer dan hal-hal yang berkaitan kebutuhan Amerika Serikat di Filipina.⁴

Pada kepemimpinan Presiden Aquino (1986-1992), kontroversi antara pemerintah Republik Filipina dan Amerika Serikat mengenai kompleks basis

¹ Syahbuddin Mangandaralam, Mengenal dari dekat Filipina: Negara Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 12.

² *Ibid.*

³ A. Kardiyat Wiharyanto. "Pembentukan Negara-negara Nasional di Asia Tenggara". *Historia Vitae*, Vol. 22 No. 2 Oktober 2008.

⁴ *Ibid.*

militer *Subic Naval Base* dan *Clark Air Base* di Filipina terjadi tepatnya pada tahun 1992. Pangkalan tersebut pada akhirnya mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan kedua negara secara militer, politik dan juga ekonomi terutama bagi Filipina.⁵

Pada 31 Desember 1991, Presiden Corazon Aquino memerintahkan agar dua pangkalan militer AS di Filipina segera di tutup secepatnya. Perintah Aquino tersebut merupakan hasil penolakan senator-senator Filipina terhadap perjanjian pangkalan militer AS yang merupakan perpanjangan dari perjanjian *Military Bases Agreement 1988*. Dimana perjanjian ini dianggap merugikan Republik dan masyarakat Filipina terlepas dari dampak positifnya. Hal ini sesuai dengan persyaratan konstitusi Filipina dimana mengharuskan semua basis asing di tanah Filipina harus dihapus kecuali jika perjanjian baru disetujui untuk mengizinkan basis militer asing tersebut tetap tinggal.⁶

Namun menutup dua basis terbesar AS di Filipina pada akhirnya menimbulkan masalah baru baik bagi Filipina maupun AS. Kerugian Filipina dapat dilihat dari sisi ekonomi, keamanan dan sosial. Sedangkan bagi AS kerugian terbesarnya setelah penutupan dua pangkalan militer tersebut adalah pengaruh politik yang tidak hanya berdampak pada Filipina namun juga di Asia Pasifik Raya, hal ini dikarenakan basis militer di Filipina adalah basis militer terbesar AS di dunia.

Meskipun pangkalan militer AS di Filipina telah ditutup, hubungan bilateral kedua negara yang sempat tegang akibat penutupan basis militer pada akhirnya mereda saat Filipina kembali membutuhkan bantuan militer AS.

Hal ini dibuktikan pada tahun 1995, dimana Presiden Fidel Ramos kembali meminta bantuan AS dan mengundang sejumlah besar tentara AS ke wilayah Filipina. Dilatarbelakangi oleh respon cepat pemerintah Filipina terkait pembangunan basis militer di *Mischief Reef* yang terletak di wilayah sengketa dengan Tiongkok. Permintaan bantuan kepada AS ini didasarkan oleh perjanjian *Mutual Defense Treaty 1951*. Pada akhirnya sejak tahun 1995, hubungan kedua negara semakin erat, khususnya dalam bidang militer. Pada tahun 1998, kedua negara menandatangani *Visiting Forces Agreement (VFA)* dengan tujuan untuk memfasilitasi pelatihan militer yang dilakukan oleh tentara AS kepada tentara

⁵ *Ibid.*

⁶ Bayoneto, M.V. (2011). The Former U.S. Bases in the Philippines: An Argument for the Application of U.S. Environmental Standards to Overseas Military Bases. *Fordham Environmental Law Review*, 6 (1), hlm. 111-155

Filipina. Tujuan daripada kebijakan ini adalah penghematan biaya militer akibat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997-1998.⁷

Pada tahun 2000-an awal tantangan global menjadi alasan utama Kerjasama militer antara Filipina dan AS kembali terjadi. Serangan kelompok teroris di AS pada tanggal 9 September 2001 merubah fokus kebijakan luar negeri dan dalam negeri AS. Tidak hanya di Amerika Serikat, terorisme dan gerakan-gerakan serupa juga berkembang di Filipina melalui pemberontakan kelompok *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Sulu. Kebijakan Bush untuk memerangi terorisme juga berdampak pada kerja sama kedua negara. Pada tahun 2002, Filipina dan AS menandatangani *Mutual Logistic Support Agreement* (MLSA).⁸

Selain untuk menanggapi kasus terorisme, kerjasama militer juga dilakukan untuk menanggapi posisi Tiongkok terkait pendudukan di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan dimana pemerintah Filipina memilih tindakan militer dengan bantuan AS. Kebijakan luar negeri Filipina bersinggungan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang saat itu berada di bawah rezim Presiden Barack Obama. Kebijakan *pivot to Asia* Presiden Obama memberikan status Filipina sebagai mitra kerja sama tradisional, kesempatan untuk bekerja sama mengatasi sengketa di LTS.

Hingga pada tahun 2014, kedua negara menandatangani *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Perjanjian ini memperbolehkan Amerika Serikat untuk mengakses fasilitas militer Filipina serta akses wilayah, izin pemerintah Filipina untuk membangun kembali basis militer dan mempertimbangkan sebuah basis militer Amerika Serikat permanen di Filipina.⁹

2.1.2 Kerjasama Filipina-AS di Bidang Ekonomi

Secara ekonomi, kerja sama kedua negara telah berlangsung pasca kemerdekaan Filipina. Sebagai negara yang berdaulat Filipina mampu menentukan arah kebijakan luar negerinya terutama terkait kerja sama ekonomi dengan AS. Bantuan finansial yang difasilitasi oleh Amerika Serikat hampir dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Filipina pada setiap masa kepemimpinan di negara yang saat ini dipimpin oleh Duterte tersebut. Kerja sama perdagangan tersebut adalah *Bell Trade Act* dan *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA).¹⁰

Bell Trade Act yang juga dikenal dengan *Philippine Trade Act* 1946 merupakan undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat yang

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

¹⁰ *office of the united states trade representative*. (n.d.). Philippines Economic Statistic. Dikutip dari <https://ustr.gov/>: <https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/philippines>

mencakup ketentuan-ketentuan yang mengikat ekonomi Filipina dengan Amerika Serikat. Merdekanya Filipina pada tahun 1946, membuat perekonomian negara ini tidak dapat dihindari dari kehancuran oleh Perang Dunia II. *Bell Act* berfungsi sebagai kuota atas ekspor Filipina ke Amerika Serikat, mematok harga peso Filipina ke dolar Amerika Serikat pada perbandingan 2:1, dan memberikan perdagangan bebas antara kedua negara selama delapan tahun, diikuti dengan penerapan tarif secara bertahap untuk 20 tahun kedepan dengan tarif 5%.¹¹

Bell Trade Act juga mewajibkan konstitusi Filipina di revisi untuk menyediakan akses yang setara kepada warga Amerika Serikat di Filipina terhadap sumber daya alam yang ada di negara tersebut serta mengizinkan AS untuk mengimpor berbagai produk dari Filipina tanpa pajak impor. Namun setelah banyak menuai protes dari kelompok nasionalis Filipina, *Bell Trade Act* kemudian digantikan dengan *Laurel-Langley Agreement* yang bertujuan untuk mengontrol nilai tukar peso, memperpanjang kuota impor gula, dan memperpanjang jangka waktu pengurangan kuota lainnya dan secara progresif menerapkan biaya untuk barang-barang Filipina yang diekspor ke Amerika Serikat.

Selain *Bell Trade Act* terdapat TIFA yang merupakan kerangka kerja sama ekonomi bilateral yang disetujui Filipina dan Amerika Serikat pada tahun 1989.¹² Melalui perjanjian ini kedua negara sepakat untuk bekerja sama dan mendorong perdagangan bebas, adil, dan seimbang antara kedua negara, termasuk penghapusan hambatan perdagangan dan menjadi stimulant dalam peningkatan perdagangan.

Di bawah TIFA, kedua negara juga menandatangani kesepakatan tentang protokol jaminan bea cukai dan perdagangan pada tahun 2010, seperti kerja sama untuk menghentikan pengiriman tekstil dan pakaian jadi yang ilegal pada tahun 2006 dimana penerapan ini merupakan komitmen akses minimum oleh Filipina.¹³

Selama dekade terakhir, perdagangan dua arah antara Filipina dan Amerika Serikat tumbuh lebih dari 25%. Pada tahun 2016, ekspor Amerika Serikat ke Filipina meningkat 9% menjadi US\$ 8.3 miliar, dengan kategori ekspor teratas seperti mesin listrik, mesin, sereal, pesawat terbang, dan tepung kedelai.¹⁴

Layanan ekspor Amerika Serikat ke Filipina meningkat lebih dari 60% sejak 2006 dan sekarang berjumlah US\$ 2,5 miliar. Pada tahun 2016, Filipina merupakan pasar ekspor barang terbesar ke-31 Amerika Serikat. Sementara investasi langsung luar negeri (*Foreign Direct Investment/FDI*) Amerika Serikat di Filipina adalah

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

US\$ 4.7 miliar pada tahun 2015 dan investasi Filipina di Amerika Serikat sejumlah US\$1,2 miliar tahun 2015.¹⁵

2.1.3 Kerjasama di Bidang Keamanan AS-Filipina

Military Base Agreement (MBA) 1947

Military Base Agreement 1947 merupakan perjanjian antara Filipina dan AS terkait keberadaan basis militer AS di wilayah kedaulatan Filipina. Perjanjian ini ditandatangani di Manila pada tanggal 14 Maret 1947 dan kurang dari dua minggu setelahnya, tentara Amerika Serikat memasuki wilayah yang menjadi kesepakatan untuk membangun basis militer Amerika Serikat. Ada dua wilayah terbesar yakni wilayah *Subic* sebagai basis angkatan laut, dan *Clark* sebagai basis angkatan udara.¹⁶

Lokasi *Subic Naval Base* berada di garis laut yang strategis dengan Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Selat Sunda dan Lombok. Dari basis angkatan laut di Subic, armada angkatan laut Amerika Serikat dapat memberikan bantuan ke negara-negara sekutu yang bersedia melakukan perjanjian kerja sama pertahanan laut dengan Amerika Serikat. Sedangkan *Clark Air Base* berfungsi sebagai markas angkatan udara yang menyediakan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat AS yang terbang di Pasifik Barat, serta berfungsi sebagai pusat logistik utama di Samudra Hindia.¹⁷

Dua basis militer Amerika Serikat di Filipina saat itu diyakini sebagai basis militer terbesar AS di dunia. Bagi Filipina, basis militer Amerika Serikat membawa beberapa keuntungan salah satunya, yang sudah di jelaskan pada bagian sebelumnya, bagaimana basis militer Amerika Serikat di Filipina membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi Filipina. Namun pada tahun 1992, kedua basis militer Amerika Serikat di Filipina harus ditutup berdasarkan pertimbangan Senat Filipina mengenai keberadaan basis militer asing di wilayah Filipina. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya memutuskan ikatan kerja sama antara kedua negara. Beberapa tahun berselang Amerika Serikat kembali membantu Filipina dalam sengketa laut dengan China, bantuan tersebut didasarkan pada *Mutual Defense Treaty 1951*.¹⁸

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Almazan, A. 2012. U.S. N-sub in Subic a Strong Signal to China: Routine Visit Comes amid Reports China is Mobilizing Fleet for Philippines Ops, dikutip dari: ProQuest online <http://search.proquest.com/docview/1014157381/13914D940E373>

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

Mutual Defense Treaty (MDT) 1951

Secara implisit, perjanjian ini merupakan kesepakatan dasar yang menekankan komitmen bersama untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan internasional secara damai, terpisah atau bersama-sama mengembangkan kapasitas untuk melawan serangan yang mengancam integritas teritorial kedua negara lebih khususnya Filipina dari ancaman serangan di Asia Pasifik. Perjanjian ini didasarkan pada Piagam PBB, di mana penyelesaian perselisihan atau sengketa dapat melibatkan pihak lain dengan cara-cara damai sehingga perdamaian internasional tetap terjaga.

Ketakutan negara-negara pasca Perang Dunia II adalah pendudukan dan sengketa wilayah dengan negara lain yang dapat mengancam kedaulatannya. Mutual Defense Treaty 1951 antara Filipina dan AS diciptakan atas alasan tersebut. Perjanjian tersebut merupakan fondasi kemandirian bilateral, meskipun tidak secara eksplisit mewajibkan AS untuk membela dan mempertahankan kawasan maritim yang diperdebatkan oleh Filipina dengan negara lain, meskipun pada awal tahun 1990an beberapa pejabat Filipina dan AS menyarankan agar perjanjian tersebut mewajibkan AS untuk membela Filipina dari berbagai ancaman luar negeri.¹⁹

Perjanjian ini yang kemudian menjadi dasar bagi kedua negara dalam pembentukan kerja sama dalam bidang pertahanan khususnya penyelesaian dan bantuan militer dalam sengketa wilayah di Filipina pada tahun 1995 dan 2014, saat penyelesaian sengketa di Kepulauan Spratly antara Filipina dan China.

Visiting Forces Agreement (VFA) 1998

Memasuki akhir 1990 negara-negara diperhadapkan dengan krisis ekonomi yang mempengaruhi situasi politik dan keamanan domestik. Kebangkitan gerakan-gerakan separatis di Mindanao membuat pemerintah Filipina mengambil kebijakan militer untuk menekan perluasan doktrin-doktrin yang disebarkan oleh kelompok MILF yang berkembang menjadi kelompok teror Abu Syyaf Group (AFG). Untuk itu pemerintah Filipina, lagi-lagi, bekerja sama dengan AS dalam Visiting Forces Agreement untuk penyediaan latihan militer. Perjanjian ini memungkinkan pasukan AS dan Filipina untuk melakukan pelatihan militer bersama.

Sebagai bukti nyata, perjanjian ini melahirkan beberapa pelatihan militer bersama yakni Balikatan, *The Joint Special Operations Task Force–Philippines*, dan *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) and Amphibious Landing Exercise*: Balikatan merupakan pelatihan militer gabungan yang paling

¹⁹ Galang, M. (2020). Perjanjian Pasukan Kunjungan Filipina–AS dan kebijakan luar negeri kekuatan kecil. Diperoleh dari East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/>

komprehensif di antara pelatihan gabungan militer lainnya. Dengan tujuan untuk mengembangkan kesiapan tempur Filipina, latihan ini semakin diarahkan untuk membangun kapasitas Filipina untuk mempertahankan diri dalam sengketa teritori dalam beberapa dekade terakhir. Pada awal pembentukannya, Balikatan berperan penting dalam pendistribusian tentara yang tergabung dalam AFP untuk melawan kelompok teror dan pemberontak di Mindanao. Pada bulan Mei 2014, Balikatan pertama setelah penandatanganan Enhanced Defense Cooperation Agreement antara Filipina dan AS diadakan dan melibatkan 3.000 tentara AFP dan 2.500 tentara AS. Pelatihan dilakukan di sejumlah wilayah dengan melibatkan manuver angkatan laut, udara dan darat serta pelatihan dalam bantuan kemanusiaan seperti penanggulangan korban massal.²⁰

Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) 2014

Selama kunjungan Presiden Obama, di bawah kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III kedua negara menandatangani Enhanced Defense Cooperation Agreement pada tahun 2014. Perjanjian ini memungkinkan akses AS yang lebih besar ke fasilitas militer Filipina, serta peningkatan kerja sama di bidang bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam. EDCA juga diharapkan dapat membantu dan melengkapi modernisasi angkatan bersenjata di Filipina. Hubungan pertahanan yang ditingkatkan antara Filipina dan AS, serta merta mengundang keinginan negara Asia Tenggara lainnya untuk bekerja sama dengan AS. Hal ini merupakan respon dari pergeseran lingkungan geopolitik di kawasan ini. Vietnam dan AS misalnya telah secara resmi mengumumkan kerjasama pertahanan pada Juni 2015, sementara Singapura menyambut baik penggunaan wilayah lautnya sebagai wilayah rotasi US Navy Pacific Fleet.²¹

2.2 Pengaruh *War on Drugs* Terhadap Penanggulangan VFA

2.2.1 War on Drugs di Era Duterte

Pada tahun 2016 Filipina merupakan salah satu negara yang darurat narkoba. Sebanyak lebih dari 35.000 kasus yang ditangani oleh kepolisian Filipina adalah mengenai kasus penggunaan dan pengedaran narkoba yang bernilai lebih dari 5 milyar peso pada awal tahun 2016. Besarnya persentase tersebut juga diiringi dengan peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Filipina itu sendiri. Dalam kurun waktu 5 tahun, tepatnya dari tahun 2010 hingga tahun 2015, Filipina mengalami peningkatan kriminalitas terutama di bidang narkoba.²²

Filipina menjadi salah satu negara dengan perdagangan dan pengedaran narkoba yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Oceania.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Tree, Sanho (2018) "The War on Drugs Breeds Crafty Traffickers," New York Times.

Kejahatan ini berkembang karena dipicu oleh keadaan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh.

Beberapa masyarakat perkotaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa mengambil jalan menjadi pengedar narkoba. Selain itu, harga narkoba seperti shabu, yaitu sebuah varian dari *methamphetamine* (stimulan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat) cukup terjangkau. Obat ini berwarna putih, berwujud serbuk kristal yang mudah larut dalam alkohol atau air, tidak berbau dan terasa pahit, biasanya dikonsumsi dengan dihisap melalui hidung, disuntik, ditelan atau dibakar seperti rokok, memudahkan penggunaannya untuk mendapatkan barang ini. Jenis narkoba ini bahkan dijuluki sebagai kokain kaum miskin.²³

Tabel 2.1. Jenis obat-obatan terlarang dan rata-rata harga jual di Filipina

Jenis Obat-obatan Terlarang	Rata-rata Harga Jual di Filipina (Philippine Peso)
<i>Methamphetamine hydrochloride</i> atau <i>shabu</i>	7,500 per gram
<i>Cannabis sativa</i> atau <i>marijuana</i>	60 per gram
<i>Cocaine</i>	5,400 per gram
<i>3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine</i> (MDMA) atau <i>Ecstasy</i>	1,700 per tablet

sumber: *Annual Report of Philippine Drug Enforcement Agency 2016*

Keberadaan narkoba di Filipina terus-menerus disalahgunakan oleh masyarakat Filipina. Presiden yang menjabat di Filipina pun terus berupaya agar kasus tersebut dapat teratasi. Upaya-upaya yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil hingga saat Duterte menjabat sebagai presiden ke-16. Dengan banyaknya jumlah pengguna Narkoba yang ada, maka Duterte melaksanakan janji yang dikatakan saat berkampanye sebelum menjadi presiden yaitu akan memberantas penyalahgunaan Narkoba di Filipina secara tegas.

Di Filipina pemberantasan narkoba dan hukumannya di atur dalam pasal 9 *Republic Act 9145* yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 500.000 peso sampai 10.000.000 peso bagi para penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang dilarang penggunaannya dan terdapat di dalam *Republic Act no. 9165* yaitu: opium, morfin, heroin, kokain atau kokain

²³ BBC Indonesia. Amnesty: Polisi Filipina 'rencanakan' pembunuhan dalam perang narkoba. Dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38824196>.

hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya.²⁴

Tabel 2.2 Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Bius di Filipina Periode 2002-2014

No	<u>Tahun</u>	<u>Jumlah (Jiwa)</u>
1	2002	9.880
2	2004	10.420
3	2006	11.040
4	2008	11.010
5	2010	12.210
6	2012	12.330
7	2014	12.370

Dari tabel di atas maka dapat dipahami bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengguna narkotika dan obat bius di Filipina terus menunjukkan tren peningkatan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2008, namun ini hanya bersifat euforia karena prosentase yang kecil. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Duterte dalam merencanakan *war on drugs*.

Pada 9 Mei 2016 Rodrigo Duterte dilantik sebagai presiden Republik Filipina yang ke 16. Salah satu kebijakan Presiden Duterte dalam memberantas peredaran narkoba di Filipina adalah ‘war on drugs’ atau perang melawan narkoba. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Command Memorandum Circular No. 16 – 2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: “Double Barrel”* tertanggal 1 Juli 2016. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi tindakan *extrajudicial killing* yang menyebabkan kematian terduga pengguna dan pengedar narkoba. Pada era pemerintahan Duterte pihak kepolisian dan warga sipil yang ingin memberantas para penyalahguna narkoba untuk menembak mati para penyalahguna narkoba yang menolak untuk ditahan. Namun dalam penanganan narkoba bersama dengan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah para pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar tetap

²⁴ *Ibid.*

dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-narkoba.²⁵

Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus narkoba sama sekali yang turut menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan setiap 1 orang yang terbunuh polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar \$300 oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna narkoba yang dimiliki oleh pihak kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya.²⁶

Extrajudicial killing akibat *war on drugs* sendiri telah menyebabkan kematian terhadap 7.080 penduduk sipil dalam rentang waktu 7 bulan terhitung sejak 1 Juli 2016 – 31 Januari 2017.²⁷ Dalam *extrajudicial killing* di Filipina diketahui bahwa pelaku melakukan pembunuhan menggunakan senjata api. Timbulnya korban jiwa dalam *extrajudicial killing* telah memenuhi syarat pertama dari perbuatan pembunuhan, dimana pelaku telah membunuh targetnya menggunakan senjata.

Media-media yang meliput pidato dari Presiden Duterte telah memperlihatkan bahwa tindakan pembunuhan terhadap orang yang diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba secara legal boleh dibunuh tanpa melalui proses hukum. Sehingga berdasarkan kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Duterte, polisi negara Filipina melaksanakan *extrajudicial killing* terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam ‘*kill list*’. Orang-orang yang masuk kedalam ‘*kill list*’ merupakan seseorang yang diduga menggunakan atau mengedarkan narkoba. Setiap orang dalam daftar tersebut akan dieksekusi satu persatu tanpa adanya proses pembuktian yang sesuai dengan hukum terlebih dahulu.²⁸

2.2.2 Kecaman AS dan ICCPR Terhadap *War on Drugs* Duterte

Keputusan Duterte dalam *War On Drugs* membuat organisasi HAM seperti *International Amnesty* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*

²⁵ Bowring, P. 19 Juli 2019,. Duterte’s proposal to change the Philippines’ name highlights the vexed history of place nomenclature. Retrieved from South China Morning Post:

<https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/asia/article/2186300/dutertes-proposal-change-philippines-name-highlights>

²⁶ CNN Philippines. 24 Januari 2018. Duterte's drug list: What we know so far. Tersedia di <http://cnnphilippines.com/news/2016/08/19/President-Dutertelist-of-drug-personalities-politicians.html>.

²⁷ *ibid*

²⁸ *Amnesty International UK, more than 7,000 killed in the Philippines in six months, as president encourages murder*, dikutip dari; <https://www.amnesty.org.uk/philippines-president-duterte-war-on-drugs-thousands-killed>

(ICCPR), menyerukan investigasi mereka sendiri yang berujung pada dakwaan bahwa pembunuhan tanpa pengadilan yang dilakukan Duterte telah melanggar kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu terjadinya pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara.²⁹

Filipina sebagai anggota PBB telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 23 Oktober 1986. sehingga negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati melindungi dan memenuhi hak-hak manusia. Hak untuk hidup dalam ICCPR dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.³⁰

Selain pelanggaran terhadap hak untuk hidup, tindakan *extrajudicial killing* juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) ICCPR. Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 8 mengidentifikasi bahwa Pasal 9 ayat (1) berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, vagrancy, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain.³¹

Selain hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR, Filipina juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi pada 7 Juni 1974 untuk melindungi hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental. Hak atas mencari kesehatan, antara lain untuk menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, barang dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi termasuk bagi orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik dan mental, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ICESCR. Sehingga seseorang yang mempunyai ketergantungan obat-obatan

²⁹ Amnesty International. 2016, October. Philippines: Duterte's 100 days of carnage. Dikutip kembali dari amnesty.org: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/>

³⁰ Amnesty International Limited. 2016. "Philippines: Duterte's 100 days of carnage". <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/>.

³¹ *ibid*

terlarang tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan tanpa adanya suatu diskriminasi.³²

Selain protes dan investigasi dari INGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, presiden AS Barrack Obama pada tahun 2016 di Laos saat KTT ASEAN mengungkapkan kritiknya terhadap pilihan Duterte mengenai pembunuhan tanpa pengadilan.³³ Hal ini dibalas oleh Duterte dalam pidatonya di konferensi pers di Filipina yang menyatakan penyesalannya terhadap keputusan Amerika yang ikut campur terlalu banyak dalam urusan dalam negeri Filipina. Duterte bahkan menambahkan ungkapan seperti “*Mr. Obama, you can go to hell* (Presiden Obama, anda bisa pergi ke neraka).”³⁴

Pada Januari 2020, Senator Filipina Ronald Dela Rosa membenarkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mencabut visanya ke Amerika Serikat. Mantan kepala polisi di bawah Presiden Rodrigo Duterte tersebut telah terlibat dalam pembunuhan di luar proses hukum yang terkait dengan *War on Drugs*. Tindakan Amerika Serikat mewakili perubahan kebijakan terhadap pemerintah Filipina dan *War on Drugs*, dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan berhubungan diplomatik dengan pejabat pemerintah yang secara langsung terlibat dalam pembunuhan tanpa proses hukum di Filipina.³⁵

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah AS mencoba menegaskan kepada pemerintahan Filipina bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua pejabat pemerintah Filipina yang terkait dengan *War on Drugs*. AS disini mencoba mengirimkan pesan penting bagi para pejabat pemerintahan Filipina bahwa keterlibatan mereka dalam kejahatan Duterte akan membuat mereka menjadi target non-grata di AS.³⁶

Duterte pada waktu yang sama merespon hal ini dengan mengancam pemberhentian kerjasama VFA. Duterte menganggap ketidakadilan terjadi, dimana tentara AS bebas keluar-masuk Filipina dan berlatih di Filipina sementara Senator mereka dicabut kekebalan diplomatiknya.³⁷

³² *ibid*

³³ Rappler. (2016, September). Obama to Duterte: Fight crime, terror 'the right way'. Dikutip kembali dari Rappler: <https://www.rappler.com/nation/obama-duterte-crime-war-right-way>

³⁴ Bussines Insider. (2016, Oktober). Philippines President Duterte: 'Mr. Obama, you can go to hell'. Dikutip kembali dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=zkxDbCctEaQ>

³⁵ CNN, E. S. (2020, January). Dela Rosa confirms his US visa has been canceled. Diambil kembali dari CNN: <https://cnnphilippines.com/news/2020/1/22/ronald-bato-dela-rosa-united-states-visa.html?fbclid=IwAR0IDW0kEf6YKN8ndKSVQmtkgS53li14rOE2MhLGw6Xl0qXH4DHaj7devYw>

³⁶ *ibid*

³⁷ *ibid*

2.3 Penangguhan VFA oleh Presiden Rodrigo Duterte

Pada 11 Februari 2020, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan melalui Twitter bahwa dia menggunakan klausul penghentian VFA, yang dimana VFA ini mengatur status angkatan bersenjata Amerika Serikat yang berada di Filipina dalam hal-hal termasuk bea cukai, imigrasi, dan kriminal yurisdiksi.³⁸

Berdasarkan VFA, salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri, yang menjadi permanen setelah 180 hari diumumkannya pemberhentian kerjasama. Sementara klausul penghentian VFA tampak jelas, konsekuensi dari penghentian VFA dan perjanjian internasional yang ada antara Filipina dan Amerika Serikat di bawah hukum internasional akan merambat dan mempengaruhi ke perjanjian keamanan yang lain di antara dua negara.

Sejak tahun 1998, VFA telah menyediakan kerangka hukum untuk Kerja sama militer AS-Filipina bahkan menjadi penopang untuk memperkuat hubungan penting kemitraan regional di Asia Tenggara. Hal ini juga karena VFA merupakan salah satu rangkaian kesepakatan yang terbukti memperkuat posisi AS dan Filipina di LTS, termasuk di dalamnya *Mutual Defence Treaty* dan *EDCA*.

VFA tidak hanya sebatas mengatur ketentuan mengenai pergerakan personel AS di Filipina namun juga menyediakan sarana di mana AS dapat membobilisasi pertahanannya di kawasan Asia Tenggara melalui penempatan pasukan dan pasokan logistik, sekaligus mencoba mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

Keputusan Presiden Duterte untuk mengakhiri dan menanggukhan VFA mencerminkan dampak politik yang rumit dari VFA. Tanpa perlindungan hukum VFA, AS kemungkinan akan menanggukhan sebagian besar kerja sama pertahanan kegiatan dengan Filipina, sehingga merusak inisiatif strategis seperti kebijakan maritim Amerika Serikat di LTS.

Penyebab utama dari penangguhan VFA menurut banyak pengamat adalah keputusan AS untuk mencabut visa Senator Ronald dela Rosa, sekutu dekat Presiden Rodrigo Duterte. Dela Rosa mengepalai Polisi Nasional Filipina selama periode 2016-2018 dan dianggap sebagai tangan kanan Duterte selama *War on Drugs* yang telah mengakibatkan ribuan pembunuhan di luar proses hukum. Senator Ronald dela Rosa merupakan mantan kepala Kepolisian Nasional Filipina dan dikenal sebagai arsitek di balik kampanye berdarah *War on Drugs*. Dela Rosa telah mengkonfirmasi berita bahwa visa AS-nya dibatalkan, dengan mengatakan

³⁸ *ibid*

pejabat AS memberitahunya bahwa dia bisa mengajukan visa jenis lain jika dia mau.

